



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 155 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN
KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI
LANGSUNG KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung percepatan realisasi investasi, perlu diterapkan kemudahan investasi kepada perusahaan yang telah mendapatkan Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau perizinan berusaha yang berlokasi di Kawasan Industri, untuk dapat langsung melaksanakan konstruksi dan secara paralel mengurus perizinan dan fasilitas yang diperlukan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, telah diterbitkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;
 - c. bahwa memperhatikan hasil verifikasi tim terhadap beberapa kawasan industri yang diusulkan oleh gubernur dan bupati/wali kota tahun 2018, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5806);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI.
- PERTAMA : Ketentuan DIKTUM PERTAMA Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu Untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018, diubah sehingga DIKTUM PERTAMA berbunyi sebagai berikut:
“Menetapkan Kawasan Industri untuk lokasi penerapan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.”
- KEDUA : Ketentuan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Industri Tertentu Untuk Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 41 Tahun 2018, diubah sehingga DIKTUM KEEMPAT berbunyi sebagai berikut:
“Perusahaan yang telah memperoleh Izin Investasi/Izin Prinsip Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal beserta paket izin/dokumen dan register permohonan penerbitan perizinan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (*checklist*) dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau PTSP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi atau PTSP di DPMPTSP Kabupaten/Kota atau PTSP di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dengan lokasi proyek di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, diperbolehkan untuk melaksanakan langsung kegiatan konstruksi sepanjang memenuhi Tata Tertib Kawasan Industri.”

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Suhartono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG
PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU
UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG
KONSTRUKSI

DAFTAR KAWASAN INDUSTRI UNTUK LOKASI PENERAPAN
KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONSTRUKSI

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Kabupaten/ Kota - Provinsi)
1.	Kawasan Industri Kendal	PT. Kawasan Industri Kendal	Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah
2.	Kawasan Industri Bukit Semarang Baru/BSB	PT. Karyadeka Alam Lestari	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kawasan Industri Wijaya Kusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
4.	Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate/JIPE	PT. Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
5.	Kawasan Industri Bantaeng/KIBA	PT. ISDN Bantaeng Corp.	Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Kawasan Industri Terpadu Wilmar/KITW	PT. Multimas Nabati Asahan	Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7.	Kawasan Industri Modern Cikande Industrial Estate/MCIE	PT. Modern Industrial Estate	Kabupaten Serang, Provinsi Banten
8.	Kawasan Industri Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC	PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon	Kota Cilegon, Provinsi Banten
9.	Kawasan Industri Bekasi Fajar Industrial Estate/BFIE	PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, Tbk.	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
10.	Kawasan Industri Delta Silicon 8	PT. Lippo Cikarang, Tbk.	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
11.	Kawasan Industri Karawang Internasional Industrial City/KIIC	- PT. Maligi Permata Industrial Estate - PT. Karawang Tatabina Industrial Estate	Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
12.	Kawasan Industri Suryacipta City of Industry	PT. Suryacipta Swadaya	Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
13.	Kawasan Industri GT Tech Park	PT. Bintang Puspita Dwikarya	Kabupaten Karawang, Provinsi

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Kabupaten/ Kota - Provinsi)
			Jawa Barat
14.	Kawasan Industri Medan/KIM	PT. Kawasan Industri Medan	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
15.	Kawasan Industri Artha Industrial Hill	- PT. Karawang Cipta Persada - PT. Daya Kencanasia	Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
16.	Kawasan Industri Greenland International Industrial Center/GIIC	PT. Puradelta Lestari	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
17.	Kawasan Industri Jababeka Tahap III	PT. Jababeka Infrastruktur	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
18.	Kawasan Industri Kota Bukit Indah Industrial City	PT. Besland Pertiwi	Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
19.	Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah	PT. Indotaisei Indah Development	Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
20.	Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung/JIPS	PT. Jawa Tengah Lahan Andalan	Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
21.	Kawasan Industri Maspion	PT. Maspion Industrial Estate	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
22.	Kawasan Industri Tuban	PT. Kawasan Industri Gresik	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
23.	Kawasan Industri Batamindo Industrial Park	PT. Batamindo Investment Cakrawala	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
24.	Kawasan Industri Bintang Industrial Park II	PT. Bintang Propertindo	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
25.	Kawasan Industri Kabil Integrated Industrial Estate	- PT Kabil Citranusa (KCN) - PT Kabil Indonusa Estate (KIE)	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
26.	Kawasan Industri West Point Maritime Industrial Part	PT. Batam Sentralindo	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
27.	Kawasan Industri Dumai	PT. Kawasan Industri Dumai	Kota Dumai, Provinsi Riau
28.	Kawasan Industri Kariangau	Perusahaan Daerah Kota Balikpapan	Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
29.	Kawasan Berikat	PT. Kawasan Berikat	Provinsi DKI

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Kabupaten/ Kota - Provinsi)
	Nusantara	Nusantara (Persero)	Jakarta
30.	Kawasan Industri Jakarta Industrial Estate/JIEP	PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Provinsi DKI Jakarta
31.	Kawasan Industri Marunda Center	PT. Multikarya Hasilprima	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
32.	Kawasan Industri Lobam	PT. Bintan Inti Industrial Estate	Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
33.	Kawasan Industri Millenium Industrial Estate	PT. Bumi Citra Permai Tbk.	Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
34.	Kawasan Industri East Jakarta Industrial Park/EJIP	PT. East Jakarta Industrial Park	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
35.	Kawasan Industri Bekasi International Industrial City	PT. Hyundai Inti Development	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
36.	Kawasan Industri MM 2100 Industrial Town	PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
37.	Kawasan Industri Terpadu Indonesia - China/KITIC	PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China	Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
38.	Kawasan Industri Kujang Cikampek	PT. Kawasan Industri Kujang Cikampek	Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
39.	Kawasan Industri Lion	PT. Singa Purwakarta Jaya	Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
40.	Kawasan Industri Cibinong Center Industrial Estate	PT. Cibinong Center Industrial Estate	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
41.	Kawasan Industri Rancaekek Industrial Estate	PT. Dwipapuri Abadi	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
42.	Kawasan Industri Tanjung Emas Export Processing Zone/TEPZ	PT. Lamicitra Nusantara	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
43.	Kawasan Industri Industrial & Pergudangan Safe N Lock	PT. Makmur Berkah Amanda	Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
44.	Kawasan Industri Tanjung Buton	PT. Kawasan Industri Tanjung Buton	Kabupaten Siak, Provinsi Riau
45.	Kawasan Industri Padang Industrial Park	PT. Padang Industrial Park	Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
46.	Kawasan Industri Makassar/KIMA	PT. Kawasan Industri Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Kawasan Industri	Perusahaan Kawasan Industri	Lokasi (Kabupaten/ Kota - Provinsi)
47.	Kawasan Industri Piyungan	PT. Yogyakarta Isti Parama	Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
48.	Kawasan Industri Karawang New Industry City	PT. CFLD Karawang New Industry City Development	Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG